



Kesadaran Hukum sebagai Fondasi dalam Membentuk Karakter Warga Negara yang Baik

Izza Madani¹, Irwan Putra², Maimun³, Putra Setiawan⁴

^a Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia¹

^b Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Indonesia²

^c Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Indonesia³

^d Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Indonesia⁴

¹ izzamadani.2024@student.uny.ac.id

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan elemen penting dalam pembentukan karakter warga negara yang baik, terutama di Indonesia. Namun, tantangan penegakan hukum dan korupsi masih menghambat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kesadaran hukum dan karakter warga negara melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis konten digunakan untuk mengkaji sembilan artikel utama yang membahas kesadaran hukum serta implikasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemahaman masyarakat terhadap hukum relatif tinggi, ketaatan terhadap hukum masih rendah. Pendidikan kewarganegaraan dan penyuluhan hukum diidentifikasi sebagai alat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, dengan fokus pada pengajaran hak, kewajiban, dan nilai moral. Selain itu, media dan budaya juga berkontribusi dalam membentuk perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pendidikan hukum yang dimulai sejak dini dan penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan hukum, sehingga menciptakan warga negara yang taat hukum.

ABSTRACT

Legal awareness is a crucial element in shaping good citizen character, particularly in Indonesia. However, challenges in law enforcement and corruption continue to hinder public compliance with the law. This study aims to explore the relationship between legal awareness and citizen character through a qualitative literature review. Content analysis techniques were used to examine nine key articles discussing legal awareness and its implications. The results indicate that although public understanding of the law is relatively high, compliance with it remains low. Civic education and legal counseling are identified as important tools for increasing legal awareness, with a focus on teaching rights, obligations, and moral values. Furthermore, media and culture also contribute to shaping public legal behavior. This study concludes that synergy between early legal education and consistent law enforcement is essential to encourage legal compliance, thereby creating law-abiding citizens.

Informasi Artikel

Diterima : 18 Maret 2025

Disetujui: 27 Juni 2025

Kata kunci:

Kesadaran Hukum, Karakter, Warga Baik

Article's Information

Received: 18 March 2025

Accepted: 27 Juny 2025

Keywords:

Legal Awareness, Character, Good Citizen

Pendahuluan

Kesadaran hukum merupakan salah satu pilar penting dalam pembentukan warga negara yang baik. Di Indonesia, kesadaran hukum sering kali masih menjadi tantangan besar, terlihat dari berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Pelanggaran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelanggaran lalu lintas, korupsi, hingga tindakan kriminal lainnya. Rendahnya kesadaran hukum ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi negara (Kartini, 2020).

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pendidikan ini, siswa diajarkan tentang prinsip-prinsip dasar hukum, hak asasi

manusia, dan sistem peradilan di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum. Pendidikan kewarganegaraan juga membantu siswa memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sehingga dapat berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat (Sila, 2024).

Penanaman kesadaran hukum juga perlu dilakukan melalui berbagai program sosialisasi dan kampanye publik. Pemerintah dan lembaga terkait harus aktif dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya kesadaran hukum dan dampak negatif dari pelanggaran hukum. Program-program ini dapat mencakup seminar, workshop, dan kampanye media yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan peraturan yang berlaku (Hadi, 2021).

Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan warga negara akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih menghargai hak dan kewajiban mereka, serta hak dan kewajiban orang lain. Hal ini akan membantu menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya keadilan dan ketertiban sosial (Annisa, 2023).

Dengan demikian, kajian literatur terkait kesadaran hukum dan implikasinya dalam pembentukan karakter warga negara yang baik sangat penting untuk dilakukan. Hasil telaah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendukung terciptanya warga negara yang bertanggung jawab dan patuh terhadap hukum.

Metode

Penelitian ini tergolong dalam tipe studi kepustakaan, yang berarti peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk mendalami topik ini. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana kesadaran hukum dapat mempengaruhi perilaku dan sikap warga negara. Melalui teknik analisis konten, peneliti akan mengkaji sejumlah artikel, yang berkaitan dengan kesadaran hukum serta implikasinya terhadap pembentukan karakter warga negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang peran kesadaran hukum dalam membentuk masyarakat yang patuh hukum dan berintegritas (Zed, 2008).

Hasil Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada identifikasi sembilan artikel utama yang membahas tentang kesadaran hukum sebagai fondasi dalam membentuk karakter warga negara yang baik, sebagaimana yang terlihat pada table 1.1. Artikel-artikel tersebut mengungkapkan berbagai pendekatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum dan etika yang relevan dengan pendidikan kewarganegaraan. Setiap artikel memberikan wawasan mendalam tentang peranan pendidik, strategi yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan dampak dari upaya peningkatan kesadaran hukum, sehingga memberikan landasan yang kuat untuk memahami kompleksitas dan signifikansi kesadaran hukum dalam konteks pembentukan karakter di Indonesia.

Melalui analisis yang mendalam terhadap sembilan artikel, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami kompleksitas dan signifikansi kesadaran hukum dalam konteks pembentukan karakter di Indonesia. Dengan mengidentifikasi berbagai elemen yang mempengaruhi kesadaran hukum, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, serta meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan di tanah air. Hal ini pada gilirannya dapat menciptakan generasi muda yang lebih bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap nilai-nilai hukum dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Table 1.1 Identifikasi literatur

Judul & Peneliti	Anotasi
Nisa, E. (2022). Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia. <i>De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</i> . 2 (2) :70-78.	Tingkat kesadaran hukum warga Indonesia masih tergolong rendah, meskipun masyarakat umumnya memahami hukum yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa banyak warga yang tetap melakukan pelanggaran hukum meskipun sadar akan konsekuensinya. Misalnya, pengguna dan pengedar narkoba mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum, namun tetap melakukannya. Faktor ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman hukum, ketaatan terhadap hukum masih lemah, yang berdampak pada rendahnya penegakan hukum dan ketertiban masyarakat
Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). <i>DIMENSI-Jurnal Sosiologi</i> , 8 (2).	Pelanggaran hukum sering kali terjadi karena sejumlah faktor yang saling berkaitan, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan ketidakadilan sosial. Lemahnya penegakan hukum dan ketidakadilan dalam penerapan hukum menjadi penyebab utama pelanggaran hukum. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya mendorong perilaku yang jauh dari kata warga yang baik.
Putra, AD, Martha, GS, Fikram, M., & Yuhan, RJ (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. <i>Jurnal Statistika Terapan Indonesia</i> . 3 (2) : 123-131.	Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Peningkatan populasi dan kemiskinan juga cenderung meningkatkan tingkat kejahatan, sementara pendidikan yang lebih baik dapat mengurangi kemiskinan dan, secara tidak langsung, mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, untuk menjadi warga yang baik, penting bagi masyarakat dalam mendukung pendidikan dan upaya pengentasan kemiskinan sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran hukum.
Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan	Pendidikan Kewarganegaraan berperan signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Melalui

Judul & Peneliti	Anotasi
Kewarganegaraan. <i>JOCER: Journal of Civic Education Research</i> . 2 (1) : 8-14.	pendidikan ini, siswa belajar tentang prinsip-prinsip dasar hukum, hak asasi manusia, dan sistem peradilan, yang pada gilirannya membantunya memahami peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kesadaran hukum yang tinggi mendorong perilaku yang patuh terhadap norma-norma hukum, mengurangi pelanggaran, dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan tertib
Andraini, R. (2023). Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum. <i>Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum</i> , 3 (3), 100-106.	Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum dapat dilakukan melalui tindakan dan pendidikan. Tindakan meliputi peningkatan ancaman hukuman dan pengawasan yang ketat terhadap ketaatan warga negara terhadap undang-undang, sehingga masyarakat terdorong untuk patuh. Pendidikan, di sisi lain, berfokus pada pengajaran nilai-nilai hukum sejak dini melalui kurikulum sekolah dan program pelatihan masyarakat. Kombinasi tindakan dan pendidikan ini efektif dalam menciptakan kesadaran hukum yang tinggi, yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik dan memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum dalam masyarakat.
Mursidah, MAI (2017). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum. <i>Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik</i> . 8 (2) : 104-116.	Meningkatkan kesadaran hukum individu dapat dilakukan melalui sejumlah cara yang efektif, seperti pendidikan hukum, penyuluhan hukum, dan keteladanan dari para pemimpin masyarakat. Pendidikan hukum yang terstruktur dan mudah diakses membantu individu memahami hak dan kewajibannya dalam konteks hukum, serta konsekuensi dari tindakannya. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat menjangkau kelompok-kelompok marginal yang sering kali kurang terlayani. Selain itu, keteladanan dari pemimpin masyarakat dalam mematuhi hukum dapat memberikan contoh nyata bagi individu untuk mengikuti aturan yang berlaku. Dengan kombinasi pendekatan ini, kesadaran hukum dapat ditingkatkan, sehingga individu dapat berperan aktif sebagai warga negara yang

Judul & Peneliti	Anotasi
	baik dan berkontribusi pada penegakan hukum yang adil.
Hutama, V., & Sabijanto, VV (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. <i>Multiverse: Jurnal Multidisiplin Terbuka</i> , 2 (2), 212-218.	Keluarga, teman, dan komunitas memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran hukum individu. Dalam konteks ini, keluarga berfungsi sebagai lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai hukum dan etika kepada individu, sementara teman dan komunitas memperkuat atau mengubah pemahaman tersebut melalui interaksi sosial dan pengaruh kelompok. Pendidikan hukum yang diberikan oleh keluarga dan didukung oleh komunitas dapat meningkatkan pemahaman individu tentang hak dan kewajibannya, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses hukum. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi pendidikan, dan masyarakat sipil juga penting untuk menyediakan akses informasi hukum yang inklusif dan memberdayakan individu untuk memahami serta menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Semadi, AAGP (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. <i>IJOLARES: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia</i> . 2 (1) : 14-19.	Media memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum individu dengan menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai penegakan hukum. Media sosial dianggap dapat membantu aparat penegak hukum dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan menyebarkan informasi tentang kasus-kasus hukum dan proses penegakannya, media sosial berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif, mendorong individu untuk lebih memahami dan mematuhi hukum yang berlaku.
Muhtarom, M. (2015). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat. <i>Suhuf</i> . 27 (2) : 121–144.	Budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran hukum individu, karena nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat membentuk persepsi dan sikap terhadap hukum. Pluralitas nilai-nilai budaya dalam masyarakat Indonesia sering kali menyebabkan konflik hukum dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini terjadi karena perbedaan keyakinan dan norma budaya yang dipegang oleh individu,

Judul & Peneliti	Anotasi
	yang kadang-kadang bertentangan dengan hukum negara. Oleh karena itu, pendekatan kultural yang menghargai keragaman budaya diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam Masyarakat

Berdasarkan table 1.1, maka dapat dipahami bahwa kesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter warga negara yang baik, seperti yang ditunjukkan dalam sejumlah penelitian yang diidentifikasi. Meskipun masyarakat Indonesia umumnya memahami hukum yang berlaku, ketaatan terhadap hukum masih rendah, disebabkan oleh faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, ketidakadilan sosial, dan kurangnya pendidikan hukum yang memadai. Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif dan penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda, sementara pengaruh media, budaya dan interaksi sosial dalam keluarga serta komunitas juga berperan dalam membentuk perilaku hukum individu. Oleh karena itu, kombinasi upaya pendidikan dan tindakan penegakan hukum yang adil diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, aman, dan tertib.

Pembahasan

Ucapan terima kasih digunakan untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berperan dalam penelitian/artikel. Ucapan terima kasih juga dapat diberikan kepada pihak yang memberikan dukungan secara finansial. Apabila penelitian menggunakan dana DIPA atau hibah dari Kemenristekdikti, tuliskan nomor kontrak penelitiannya.

Kesadaran hukum adalah elemen penting dalam membentuk karakter warga negara yang baik. Meskipun masyarakat Indonesia umumnya memiliki pemahaman tentang hukum yang berlaku, kenyataan menunjukkan bahwa ketaatan terhadap hukum masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

1. Pentingnya Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, ada sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya ketaatan terhadap hukum di Indonesia. Salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum. Ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan menciptakan rasa skeptisisme di masyarakat. Masyarakat cenderung merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara merata, yang membuatnya enggan untuk mematuhi peraturan yang ada.

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Tauratiya (2018) yang menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap institusi hukum dapat mengurangi kepatuhan hukum masyarakat. Saat masyarakat merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara merata, maka individu cenderung enggan untuk mengindahkan peraturan yang ada, yang pada akhirnya memperburuk situasi hukum di negara tersebut.

Korupsi di kalangan aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap ketidakadilan dalam penegakan hukum. Praktik korupsi ini dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas proses hukum, sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat. Menurut penelitian Hananti dkk (2023), korupsi di kalangan aparat penegak hukum sering kali melibatkan suap, transaksi ilegal, dan penyalahgunaan wewenang, yang semuanya berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Selain itu, kurangnya

profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum juga memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas aparat penegak hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan.

Kelemahan struktural dalam lembaga penegak hukum juga berkontribusi terhadap rendahnya ketaatan hukum. Ketidaksetaraan dalam sistem peradilan, di mana hukum sering kali lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu juga memperburuk situasi. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa bahwa hukum tidak adil dan tidak dapat diandalkan, sehingga individu lebih cenderung untuk melanggar hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Penegakan hukum harus diperkuat dengan mengatasi korupsi dan intervensi politik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum (Putri, 2024).

Secara keseluruhan, ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk bertindak secara adil dan transparan dapat mengurangi kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menciptakan siklus ketidakpercayaan yang berdampak negatif pada karakter warga. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam sistem penegakan hukum yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas, guna memulihkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum dapat ditingkatkan sebagai fondasi dalam membentuk karakter warga yang baik dan menjadikan hukum sebagai alat keadilan bagi semua.

2. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dan Penyuluhan Hukum

Berdasarkan hasil kajian literatur, maka diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan memainkan peran krusial dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara serta nilai-nilai moral dan etika. Juliati dkk. (2019) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif tidak hanya mengajarkan aspek teknis hukum, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan pemahaman mendalam tentang implikasi sosial dan moral dari tindakan hukum. Dengan demikian, individu diharapkan menjadi warga negara yang menghargai dan mematuhi hukum berdasarkan kesadaran etis dan moral yang kuat.

Penyuluhan hukum juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat karena memberi pemahaman terkait hak dan kewajiban, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam proses hukum. Penyuluhan hukum di Indonesia telah terbukti meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat marginal melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, penyuluhan hukum berkontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan patuh terhadap peraturan yang berlaku (Saepulloh, 2022).

Secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan hak dan kewajiban, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang membentuk sikap warga. Di sisi lain, penyuluhan hukum meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, terutama di kalangan kelompok yang kurang terlayani. Dengan demikian, kedua aspek ini saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan taat terhadap peraturan, yang pada gilirannya membentuk karakter warga yang baik.

3. Pengaruh Media, Budaya, dan Interaksi Sosial

Hasil studi kepustakaan menunjukkan bahwa pengaruh media dan budaya sangat besar dalam membentuk perilaku hukum individu. Media memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik,

sehingga penyampaian informasi yang akurat dan positif mengenai hukum dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum. Budaya masyarakat yang menghargai hukum dan norma-norma sosial juga sangat berpengaruh. Keluarga dan komunitas adalah tempat pertama individu belajar tentang perilaku hukum. Interaksi sosial di lingkungan ini dapat menciptakan norma yang mendukung atau menentang ketaatan terhadap hukum.

Penyampaian informasi yang akurat dan positif oleh media dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, sementara pemberitaan yang sensasional atau negatif dapat menimbulkan stigma dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini berdampak pada sikap masyarakat yang cenderung skeptis atau bahkan menolak untuk mematuhi hukum (Semadi, 2024)

Budaya juga memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku hukum individu, karena budaya mencakup nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Budaya hukum yang kuat dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan mendukung penegakan hukum yang efektif. Misalnya, dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya dan agama mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum menjadi penting untuk mencapai tujuan hukum nasional dan menciptakan warga negara yang sadar hukum (Purba, 2017).

Lebih lanjut, interaksi sosial dalam komunitas dapat menciptakan norma yang mendukung atau menentang ketaatan terhadap hukum. Saat masyarakat secara kolektif menghargai hukum, akan tercipta iklim sosial yang mendorong kepatuhan hukum. Sebaliknya, jika ada budaya ketidakpatuhan atau meremehkan hukum, hal ini dapat memperkuat perilaku menyimpang. Misalnya, dalam suatu komunitas di mana pelanggaran kecil sering dianggap sebagai hal yang wajar, individu mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindakan serupa tanpa merasa bersalah. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan budaya hukum yang positif, di mana norma-norma sosial mendukung ketaatan dan penghormatan terhadap hukum (Adyas dkk, 2015).

Pada intinya, sinergi antara media dan budaya masyarakat sangat berkontribusi dalam membentuk perilaku hukum individu. Media perlu bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan konstruktif, sementara budaya masyarakat harus dikembangkan untuk mengedepankan dan menghargai nilai-nilai hukum. Langkah-langkah ini menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan patuh terhadap norma-norma yang berlaku, sehingga keadilan dan ketertiban dapat terwujud dengan lebih baik. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya menjadi aspek penting dalam individu, tetapi juga sebagai pilar dalam menciptakan karakter warga yang baik

4. Keterpaduan Upaya Pendidikan dan Penegakan Hukum

Untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, diperlukan kombinasi antara upaya pendidikan dan tindakan penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan transparan agar masyarakat percaya bahwa hukum benar-benar diterapkan. Jika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil, maka akan lebih terdorong untuk mematuhi aturan yang ada.

Pendidikan hukum sebaiknya diberikan sejak usia dini untuk membentuk karakter anak dan membantunya memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menekankan hak anak atas pendidikan berkualitas. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, individu dapat mengenali konsekuensi dari tindakannya dan menghindari perilaku kriminal. Pendidikan hukum dapat dilakukan secara efektif melalui pendekatan yang sederhana dan terintegrasi dengan pembelajaran lainnya, serta melibatkan orang tua dan guru dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesadaran hukum. Implementasi pendidikan hukum

yang proporsional dan bertahap sesuai dengan usia diharapkan dapat mencegah kenakalan remaja dan meningkatkan kesadaran hukum dalam Masyarakat (Gustana, 2024).

Hartanto (2015) mengungkapkan bahwa menciptakan masyarakat yang sadar hukum adalah proses yang kompleks, memerlukan sinergi antara pendidikan hukum dan penegakan hukum yang efektif. Kesadaran hukum berfungsi sebagai penghubung antara perilaku masyarakat dan norma hukum, di mana pemahaman terhadap hak dan kewajiban sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Namun, tingkat kesadaran hukum di Indonesia masih tergolong rendah, yang mencerminkan tantangan dalam sosialisasi hukum di masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pendidikan hukum yang komprehensif dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk membangun budaya hukum yang kuat, sehingga masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena tekanan, tetapi juga karena kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya hukum dalam kehidupan sosial.

Interaksi antara pendidikan hukum dan penegakan hukum menciptakan sinergi yang saling mendukung, di mana pendidikan yang baik meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam penegakan hukum. Begitu pula dengan penegakan hukum yang adil, dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk belajar dan memahami hukum lebih dalam (Manan, 2004).

Secara keseluruhan, untuk menciptakan kesadaran hukum, diperlukan kombinasi antara pendidikan hukum yang efektif dan penegakan hukum yang adil. Pendidikan hukum sejak usia dini membantu individu memahami hak dan kewajiban, sedangkan penegakan hukum yang konsisten dan transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sinergi antara kedua aspek ini akan mendorong kepatuhan dan partisipasi aktif masyarakat, serta membangun kesadaran hukum yang kuat, yang pada gilirannya membentuk karakter warga yang baik.

Simpulan

Kesadaran hukum adalah kunci dalam membentuk karakter warga negara yang baik. Di Indonesia, meskipun pemahaman hukum masyarakat cukup tinggi, ketaatan terhadap hukum masih rendah akibat lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Hal ini menciptakan skeptisisme di masyarakat, sehingga individu cenderung mengabaikan peraturan.

Pendidikan kewarganegaraan dan penyuluhan hukum berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan hak dan kewajiban, tetapi juga menanamkan nilai moral. Penyuluhan hukum membantu masyarakat memahami peran mereka dalam proses hukum. Kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, terutama di kalangan masyarakat marginal.

Media dan budaya juga berpengaruh terhadap perilaku hukum. Informasi yang akurat dari media dapat membentuk opini publik dan meningkatkan kepatuhan hukum. Budaya yang menghargai norma hukum mendorong sikap patuh di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan media yang bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diperlukan sinergi antara pendidikan dan penegakan hukum. Pendidikan hukum sejak dini membantu individu memahami hak dan kewajiban, sementara penegakan hukum yang konsisten membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kombinasi ini akan mendorong kepatuhan dan membentuk karakter warga negara yang baik.

Referensi

- Adyas dkk. (2015). *Seri Interaksi Sosial dan Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan*. Jakarta : WWF-Indonesia.
- Andraini, R. (2023). Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* , 3 (3), 100-106. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1614>
- Annisa. (2023). Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dalam Masyarakat. (Onlie) (<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>., diakses 29 September 2024)
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Jurnal Sosiologi*, 8 (2). <https://doi.org/10.21107/djs.v8i2.3728>
- Gustana, A. (2024). Model Pembelajaran Hukum Untuk Anak Usia Dini. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 6(2), 1861-1866. <https://www.ejournal-jp3.com/index.php/Pendidikan/article/view/1330/1058>
- Hadi, Abdul. (2021). Contoh Kesadaran Hukum Masyarakat, Pengertian, & 4 Indikatornya. (Online) (<https://tirto.id/contoh-kesadaran-hukum-masyarakat-pengertian-4-indikatornya-gmJS>., diakses 29 September 2024)
- Hananti dkk (2023). Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(5), 359-366. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79824>
- Hartanto, W. (2015). Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(3), 469-483. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.17>
- Hutama, V., & Sabijanto, VV (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse: Jurnal Multidisiplin Terbuka* , 2 (2), 212-218. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>
- Juliati dkk. (2019). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk meningkatkan kesadaran hidup yang lebih baik bagi sesama. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 29-37. <https://doi.org/10.21831/jc.v16i1.23340>
- Kartini, S. (2020). *Kesadaran Hukum*. Semarang : Alprin.
- Manan, Bagir. (2004). Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan dan Penegakkan Hukum untuk Masa Depan Indonesia. (Online) (<https://tinyurl.com/bduj4cey> ., diakses 03Oktober 2024).
- Muhtarom, M. (2015). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat. *Suhuf*. 27 (2) : 121–144. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v27i2.1428>
- Mursidah, MAI (2017). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*. 8 (2) : 104-116.
- Nisa, E. (2022). Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2 (2) :70-78. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1498>
- Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146-153. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>
- Putra, AD, Martha, GS, Fikram, M., & Yuhan, RJ (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Jurnal Statistika Terapan Indonesia*. 3 (2) : 123-131. <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>
- Putri, Adinda Natasya (2024). Penegakan Hukum Indonesia yang Lemah: Faktor dan Upaya Mengatasinya. (Online) (<https://tinyurl.com/ms6hnaxr>., diakse 02Oktober 2024)
- Rahmawati, H. N., & Azzahra, N. R. (2022). Meningkatkan Penegakan Hukum di Indonesia melalui Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Indigenous Knowledge*, 1 (1), 1-5. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/73625/pdf>

- Saepulloh, (2022). Urgensi Penyuluhan Hukum Demi Terwujudnya Masyarakat Sadar Hukum. (Online) (<https://tinyurl.com/4etv8xjd>., diakses 02 Oktober 2024)
- Semadi, A. A. G. P. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 14-19. <https://doi.org/10.60153/ijolaresh.v2i1.42>
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*. 2 (1) : 8-14. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49>
- Tauratiya, T. (2018). Faktor penyebab timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Legal Obedience). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 3(2), 63-81. <https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.1169>
- Zed, Mestika. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.